

# ANALISIS BIAYA OPERASIONAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PINRANG

*Analysis Of Operational Costs Of Financial Performance At The Office Of  
The Ministry Of Agrarian Affairs/Land Agency  
Pinrang District National*

**Nur Fadillah**

Email : [nurfadillah18081999@gmail.com](mailto:nurfadillah18081999@gmail.com)

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare  
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

## Abstrak

Terdapat tiga jenis biaya antara lain belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal setelah ditotalkan keseluruhannya semua diketahui. Pada tahun 2017 Jumlah belanja pegawai keseluruhan menurun tercatat Rp.3,624,448,248 tahun ini diketahui lebih rendah dari pada tahun-tahun lainnya, kemudian meningkat pada tahun 2018 Jumlah belanja pegawai keseluruhan Meningkat menjadi Sebesar Rp.7,693,123,816, Kemudian Pada tahun 2019 Jumlah belanja pegawai keseluruhan menurun kembali menjadi Rp.6,970,178,455 dan pada tahun 2020 Jumlah belanja pegawai keseluruhan kembali lebih menurun menjadi Rp.6,676,347,465 walaupun jumlah penurunannya tidak terlalu signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui total biaya operasional setiap tahunnya, berapa anggaran dan realisasi pada kantor pertanahan. Dari jumlah yang sudah ditotalkan selama setahun yaitu sebesar pada tahun 2017 Rp. 89,75 tahun 2018 Rp. 95,52 tahun 2019 Rp. 93,53 dan pada tahun 2020 ini sebesar Rp. 94,08. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi dan Dokumentasi (data). Sementara itu teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada kantor pertanahan terlihat tidak signifikan karena tidak dapat mengelola pengeluaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

**Kata Kunci :Biaya Operasional, Kinerja Keuangan**

## PENDAHULUAN

Biaya operasional perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba rugi perusahaan. Laba rugi merupakan ringkasan dari pendapatan dan biaya perusahaan selama periode waktu tertentu Biaya perusahaan yang dimaksudkan tersebut adalah biaya operasional dan biaya usaha perusahaan.

Penggabungan struktur ini diikuti dengan uraian tugas dan fungsi kelembagaan Kementerian Agraria yang sejatinya amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sesuai semangat Pasal 33 Ayat 3 Konstitusi UUD 1945.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyusun politik hukum serta kebijaksanaan di bidang pertanahan telah tertuang dalam undang-undang



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasa oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Menyadari begitu berarti dan pentingnya fungsi tanah bagi masyarakat Indonesia, maka pemerintah berusaha meningkatkan pengelolaan, pengaturan dan pengurusan dibidang pertanahan melalui suatu instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kantor Pertanahan kota Pinrang merupakan salah satu instansivertical dari Badan Pertanahan Nasional, hal ini terbentuk sebagai salah satu wujud dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 349). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 319).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Pertanahan tetap mengacu pada UU Pokok Agraria (UUPA). Maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang meliputi peraturan penggunaan penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden. Dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Untuk melaksanakan ketentuan pemberian hak milik atas tanah negara perlu diatur dalam suatu perundang- undangan.

Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan. Biaya adalah biaya berupa pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok, yaitu berupa biaya penjualan dan administrasi untuk memperoleh pendapatan.

Terdapat tiga jenis biaya antara lain belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal setelah ditotalkan keseluruhannya semua diketahui. Pada tahun 2017 Jumlah belanja pegawai keseluruhan menurun tercatat Rp.3,624,448,248 tahun ini diketahui lebih rendah dari pada tahun-tahun lainnya, kemudian meningkat pada tahun 2018 Jumlah belanja pegawai keseluruhan Meningkat menjadi Sebesar Rp.7,693,123,816, Kemudian Pada tahun 2019 Jumlah belanja pegawai keseluruhan menurun kembali menjadi Rp.6,970,178,455 dan pada tahun 2020 Jumlah belanja pegawai keseluruhan kembali lebih menurun menjadi Rp.6,676,347,465 walaupun jumlah penurunannya tidak terlalu signifikan. Diketahui Pada Tahun 2017 sangat menurun dari tahun-tahun lainnya, Pada Tahun 2018 diketahui lebih meningkat dari tahun lainnya, Pada Tahun 2019 Menurun dan kemudian Pada Tahun 2020 kembali menurun walaupun penurunannya tidak terlalu signifikan.

### **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kementrian Badan/Agraria Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang dengan waktu penelitian selama 3 Bulan mulai Februari – Maret 2021. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yaitu: observasi, dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan diantaranya:

1. Identifikasi Biaya Operasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang 2017-2020:  
Biaya operasional adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama kegiatan operasi perusahaan dalam jangka waktu satu periode akuntansi.



## 2. Rumus Kinerja keuangan:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan(LAKIP)

2018.Cara Mengukur Kinerja Keuangan:

Persentase

$$\text{Rencana Tingkat Capaian Rencana} = \frac{(\text{Realisasi}) - (\text{Realisasi Pencapaian Rencana})}{\dots\dots\dots} \times 100\%$$

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Adapun data biaya operasional yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam empat tahun terakhir, Pada Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 adalah sebagaiberikut:

Tabel 1. Biaya Operasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang 2017-2020

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
2017	1,988,033,531	1,492,807,717	143,607,000
2018	2,143,779,832	5,549,343,964	-
2019	2,069,134,872	4,901,043,583	-
2020	2,191,192,131	4,485,156,334	-
Total	8.392.140.366	16.428.351.598	143,607,000

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang

Berdasarkan tabel 1 maka dapat dijelaskan bahwa belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, pada laporan realisasi anggaran pada kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dapat digolongkan sebagai biaya operasional sebab dalam laporan tersebut tidak terdapat secara spesifik pos biaya operasional berbeda dengan perusahaan swasta.

Hal tersebut didasarkan dari hasil wawancara sehingga penulis dapat menggolongkan jenis belanja tersebut sebagai biaya operasional. Pada dasarnya biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan atau organisasi untuk membiaya aktivitas organisasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dijelaskan bahwa dalam empat tahun terakhir nilai biaya poperasional pada kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang mengalami fluktuasi dengan kata lain biaya-biaya tersebut mengalami peningkatan dan penurunan secara bergantian dalam empat tahun terakhir. Terdapat tiga jenis biaya antara lain belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Pada tahun 2017 belanja pegawai tercatat sebesar Rp.1,988,033,531 kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp.2,143,779,832 kemudian pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp.2,069,134,872 dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp. 2,191,192,131 walaupun jumlah peningkatannya tidak terlalu signifikan.

Kemudian untuk belanja barang kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp.1,492,807,717 kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018 menjadi Rp. 5,549,343,964 namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp.4,901,043,583 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 4,485,156,334. Sementara itu untuk jenis belanja modal hanya terdapat pada tahun 2017 sebesar Rp. 143,607,000.

Tabel 2. Kinerja Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang 2017-2020

Tahun	Penerimaan Negara Bukan Pajak
2017	-
2018	-
2019	5,832,000
2020	370,000

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang

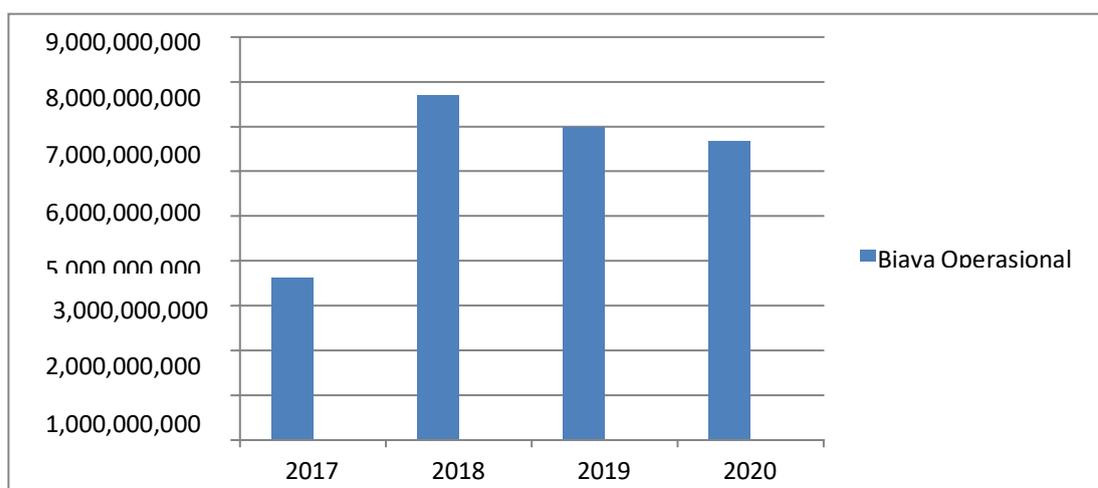
Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan Jumlah pendapatan dan Hibah pada kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang diukur dari pendapatan yang diterima selama periode akuntansi. Sumber pendapatan pada kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan Negara bukan pajak.

Berdasarkan data yang disajikan maka dapat dijelaskan bahwa penerimaan Negara bukan pajak pada kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang terdiri dari penerimaan dari pelayanan survey, pengukuran dan pemetaan, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya dan pelayanan pertimbangan teknis pertanahan.

Penerimaan Negara bukan pajak pada kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang hanya terdapat pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebab pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak ada pelayanan yang diberikan sehingga laporan realisasi anggaran menunjukkan nilai yang nihil untuk penerimaan pada kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang pada tahun tersebut.

### Pembahasan

Gambar 1. Grafik Perbandingan Biaya Operasional dan Kinerja Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang 2017-2020



Berdasarkan gambar grafik 1 dapat dijelaskan Pada Tahun 2017 Biaya Operasional mengalami sangat penurunan dari tahun-tahun lainnya, Pada Tahun 2018 meningkat

jauh lebih tinggi dari tahun lainnya, Pada Tahun 2019 mengalami sedikit penurunan, dan Pada Tahun 2020 kembali mengalami sedikit penurunan walaupun jumlah tidak terlalu signifikan, naik turunnya Ini karna jumlah belanja tidak sama biaya realisasinya.

Grafik tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara biaya operasional dalam belanja terhadap kinerja keuangan hal ini penerimaan kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang. Hal tersebut terjadi karena kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang merupakan lembaga Negara yang bertugas melayani masyarakat sehingga biaya yang dikeluarkan tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan untuk menghasilkan pendapatan sehingga berapapun jumlah biaya atau belanja yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang tidak akan berpengaruh terhadap penerimaan atau pendapatannya yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional, penerimaan negara bukan pajak pada Badan Pertanahan Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi/melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pemerintah telah beberapa kali menetapkan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.

Biaya operasional yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari pada kantor pertanahan kabupaten pinrang, kinerja keuangan pada kantor juga pengerjaannya juga baik dan teliti. Pada tahun 2010, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan dari kegiatan:

1. Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan, terdiri dari: (a) Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan; (b) Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dalam rangka Penetapan Batas, yaitu adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dan pemetaan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah atau kegiatan pertanahan lainnya, meliputi: Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah, Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Secara Massal, Pelayanan Pengembalian Batas, dan Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan, yaitu seluruh jenis kegiatan pengukuran dalam rangka penetapan batas ruang atas tanah, atau ruang bawah tanah untuk penerbitan sertifikatnya atau kegiatan pertanahan lainnya. Pengukuran dan Pemetaan ini dilaksanakan secara 3 (tiga) dimensi, dengan perhitungan panjang, lebar, dan tinggi berupa ruang dengan menggunakan metode, teknologi, waktu, penyimpanan data, dan penyajian yang lebih khusus.
2. Pelayanan Pemeriksaan Tanah, meliputi: (a) Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A. Yang dimaksud dengan "Panitia A" adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan

permohonan pengakuan hak atas tanah. (b) Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B. Yang dimaksud dengan "Panitia B" adalah Panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan Hak Guna Usaha. (c) Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah. Yang dimaksud dengan "Tim Peneliti Tanah" adalah tim yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak atas tanah instansi pemerintah dan pemerintah daerah. (d) Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstataasi. Yang dimaksud dengan "Petugas Konstataasi" adalah petugas (Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk) yang melaksanakan pemeriksaan data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka pemberian Hak Atas Tanah yang berasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar dan perpanjangan serta pembaruan Hak Atas Tanah kecuali Hak Guna Usaha.

3. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya. Yang dimaksud dengan "Konsolidasi Tanah" adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasa, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pelayanan ini meliputi: (a) Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian; (b) Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Non pertanian.
4. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan. Yang dimaksud dengan "Pertimbangan Teknis Pertanahan" adalah ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai dasar dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi, dan izin perubahan penggunaan tanah. Pelayanan ini, meliputi: (a) Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi, (b) Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi, dan (c) Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
5. Pelayanan Pendaftaran Tanah, meliputi: (a) Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali, yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar. (b) Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan yang terjadi kemudian.

Biaya operasional perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba rugi perusahaan. Laba rugi merupakan ringkasan dari pendapatan dan biaya perusahaan selama periode waktu tertentu Biaya perusahaan yang dimaksudkan tersebut adalah biaya operasional dan biaya usaha perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh *Urip Santoso (2012)* "Jual-Beli Tanah Hak Milik Yang Bertanda Bukti Petuk Pajak Bumi (Kutipan Letter C)" Hak Milik atas tanah dapat dialihkan melalui jual-beli. Dengan jual-beli, hak milik atas tanah berpindah dari pemilik tanah sebagai penjual kepada pihak lain sebagai pembeli. Jual-beli hak milik atas tanah dapat didaftarkan apabila memenuhi syarat materil dan syarat formal. Syarat materil berkaitan dengan kewenangan dan hak dari pihak penjual dan pembeli, sedangkan syarat formal berkaitan dengan pembuktian

jual-beli hak milik atas tanah. Pendaftaran jual-beli tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota harus mensyaratkan adanya jual-beli yang dibuktikan dengan adanya Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak cukup dengan Akta di bawah tangan dan *Fredrik Mayore Saranaung (2017) "Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997"* Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses peralihan hak atas tanah melalui jual beli menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan apa saja syarat sahnya peralihan hak atas tanah melalui jual beli.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat dijelaskan bahwa Biaya operasional dalam hal belanja terhadap kinerja keuangan penerimaan kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang. Hal tersebut terjadi karena kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang merupakan lembaga Negara yang bertugas melayani masyarakat sehingga biaya yang dikeluarkan tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada kebutuhan kantor dan pegawai lainnya, bukan untuk mengasilkan pendapatan sendiri sehingga berapapun jumlah biaya atau belanja yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang tidak akan berpengaruh terhadap penerimaan atau pendapatannya yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak.

### Saran

Meningkatkan penerimaan bukan pajak dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pertanahan karena pertanahan merupakan salah satu hal yang masih kurang edukasi kepada masyarakat. Masih malasnya masyarakat memperhatikan surat tanah saat melakukan jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfianty, A., et al. "Good Corporate Governance Principles And Company Value: The Impact Of Financial Performance." *Proceedings of the 3rd International Conference of Business, Accounting, and Economics, ICBAE 2022, 10-11 August 2022, Purwokerto, Central Java, Indonesia. 2022.*
- A Wijaya, (2019), *Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, Malang, finesta.*
- Ilham. (2003). Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan Di. S. *Chandra, 2003, , 12.*
- Muttaqin, M. (2007). pelaksanaan jual beli pusako tinggi. *Alitta Rosdianti, Pelaksanaan jual beli pusako tinggi (Studi Di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang), skripsi (Padang: Universitas Andalas 2007) , 12.*
- Sitanggang, A. (2017). Pengertian biaya operasional. AS Sitanggang, pengertian biaya operasional, 2017 , 12.
- SULSELRABAR, P. (2014). Analisis Pengaruh Biaya Operasional terhadap. Kinerja Keuangan. PT pln(persero) wilaya sulawesi selatan, Tenggara , dan Barat, "Profit unit", Situs resmi PLN .<http://www.pln.co.id//sulsebar/?p=62> (19 januari 2014). , 12.
- M Pongoh, (2013). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan PT.

Bumi Resources Tbk. Manado, Manajemen Bisnis dan Akuntansi.

Sri rahayu, (2014). ANALISIS PENGARUH BIAYA OPERASIONAL TERHADAP Kinerja Keuangan Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar, Makassar. UIN-Alauddin.

Kresna (2019). Tahapan-Tahapan Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan Perusahaan, Ringroad Utara, Depok, Sleman. Konsultasi Skiripsi.

Widi Winarso, (2014). PENGARUH BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Jalan Ciledug Raya No168, Ulujami Jakarta, Ecodemica.

Handoko, Widhi, (2014). Kebijakan Hukum Pertanahan; Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif, Manado. Catholic University Of de La Salle Manado.

H Susanto, (2018). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram, Mataram, Jurnal Distribusi.

Rahardjo, Mudjia (2011), Metode pengumpulan data penelitian kualitatif. Malang. ResearchRepository.

TH TITIN, (2016). *Pengaruh Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia, I-FINANCE.*

Yuli Orniati, (2019), *Laporan keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan, Universitas Gajayana Malang, Malang.*

M Sofyan, (2019). *Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Akademika.*